

**ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA
ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
DI PENGADILAN NEGERI WONOSOBO**
**(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/2022/PN WSB DAN
PUTUSAN NOMOR 7/PID.SUS-ANAK/2021/PN WSB)**

Nur Hidayati,¹ Niken Wahyuning Retno Mumpuni²
nrhaeri05@gmail.com, nikenmumpuni@gmail.com

RINGKASAN

Tindak pidana persetubuhan pada anak merupakan suatu tindakan yang pada dasarnya merujuk pada tindakan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dibawah umur. Hakim dalam penegakan hukum memiliki peran penting, dimana hakim berwenang untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana hakim dalam menjatuhkan suatu putusan atau memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan dengan perkara yang sama namun dengan putusan yang berbeda, khususnya Putusan Nomor 2/Pid.sus-Anak/2022/PN Wsb dan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan cara mengkaji atau menganalisis melalui studi kepustakaan yang juga dipadukan dengan data dilapangan kemudian akan diolah sehingga dari hasil data tersebut akan dideskripsikan kemudian penulis dapat mengatahui keharmonisan antara teori dan praktik.

Penerapan sanksi pidana yang diberikan hakim kepada pelaku tindak pidana tidak serta merta hanya memenuhi rumusan delik saja, akan tetapi terdapat beberapa hal yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan meliputi, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti seperti bukti surat, keterangan saksi, keterangan terdakwa, suatu hal yang meringankan dan hal yang memberatkan. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku anak memperhatikan beberapa asas yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak dan mengedapankan asas *ultimatum remidium*.

Putusan tersebut diharapkan dapat memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi pelaku, agar tidak mengulangi perbuatannya dan dijadikan sebagai suatu pembelajaran bagi pihak lain agar tidak melakukan suatu hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Kata kunci: Analisis, Putusan, Tiindak Pidana Persetubuhan, Anak.

¹ Mahasiswa Program Studi Hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

² Dosen Program Studi Hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

***COMPARATIVE ANALYSIS OF JUDGES DECISIONS IN CASES
CHILDREN WHO DO CRIME SEXUAL INTERCOURSE
IN WONOSOBO STATE COURT***
***(CASE STUDY OF DECISION NUMBER 2/PID.SUS-ANAK/2022/PN WSB AND
DECISION NUMBER 7/PID.SUS-ANAK/2021/PN WSB)***

Nur Hidayati,¹ Niken Wahyuning Retno Mumpuni²
nrhaeri05@gmail.com, nikenmumpuni@gmail.com

ABSTRACT

The crime of sexual intercourse with a child is an act that basically refers to sexual acts committed by adults to minors. Judges in law enforcement have an important role, where judges are authorized to impose criminal sanctions on perpetrators of criminal acts. This study describes how judges pass a decision or impose sanctions on perpetrators of crimes and what is the basis for judges' considerations in imposing a decision on the same case but with a different decision, especially Decision Number 2/Pid.sus-Anak/2022/ PN Wsb and Decision Number 7/Pid.Sus-Children/2021/PN Wsb.

This study uses the normative-empirical legal research method by reviewing or analyzing through literature studies which are also combined with data in the field and then processed so that the results of the data will be described then the writer can know the harmony between theory and practice.

The application of criminal sanctions given by judges to perpetrators of criminal acts does not necessarily only fulfill the formulation of offenses, but there are several things that are used as the basis for consideration including, facts revealed at trial, evidence such as letter evidence, witness statements, defendant's statements , a mitigating and aggravating thing. Judges in making decisions against child offenders pay attention to several principles, namely the principle of the best interests of the child and put forward the principle of ultimatum remidium.

The decision is expected to provide justice and benefits for the perpetrators, so that they do not repeat their actions and serve as a lesson for other parties so as not to do something that can harm themselves or others.

Keywords: Analysis, Decision, Crime of Sexual intercourse, Children.

¹ Student at law program study, University Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

² Lecturer at law program study, University Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.